

## BAGIAN KESEPULUH KONFLIK POLITIK DAN PENYELESAIAN KONFLIK

### A. KONSEP KONFLIK POLITIK

Dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan struktural-fungsional (konsensus) dan struktural-konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sementara itu pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Di samping itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui pada masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.

Jadi konflik politik secara longgar dapat dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya

mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik (Surbakti: 1992, 151) Sedangkan Maswadi Rauf (2001: 19) menyatakan konflik politik bukanlah konflik individu karena isu yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang tertentu.

## **B. SUMBER KONFLIK POLITIK**

Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai (Rauf, 2001: 25–28). Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi obyek kekuasaan politik. Konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyatnya sendiri karena ketidakmauan dan ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyatnya. Rakyat tidaklah patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya konflik politik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan posisi. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik. Dengan kata lain, semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik.

Posisi politik mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga menjadi rebutan. Mengapa posisi politik menjadi rebutan? Berbagai

penyebab di antaranya adalah (1) tingginya penghargaan terhadap jabatan politik; (2) memberikan kesempatan yang amat luas untuk memperoleh sumber-sumber daya yang langka; (3) membuka peluang untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan dan aspirasinya. Ini berarti posisi politik memberikan peluang yang luas untuk dapat menikmati hidup secara maksimal baik secara sah maupun tidak sah. Kemungkinan hidup senang karena terpenuhinya segala kebutuhan materi menjadi daya tarik yang melekat pada posisi politik. Tentu saja penguasa politik bisa kaya tanpa korupsi.

Konflik politik juga dapat muncul ke permukaan pada dasarnya ada dua hal yaitu karena adanya kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal (Surbakti, 1992: 151). Maksud dari kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, dokter alim ulama, cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit saja kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber tersebut.

Perbedaan-perbedaan masyarakat dalam kenyataan baru menimbulkan konflik apabila kelompok-kelompok yang berbeda tersebut memperebutkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan kesempatan dan kehormatan. Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam hal ini dapat dirumuskan